

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung.

A.P Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Aca Sugandhy, Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia group, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ali Kabul Mahi, 2016, *Pengembangan Wilayah, Teori dan Aplikasi*, Prenadamedia, Jakarta.

Atjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.

—————, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi Cetakan Keduabelas, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2001, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke III, Rineke Cipta, Jakarta.

Eko Yulian Isnur, 2012, *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023, *Pedoman Penulisan Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.

Inwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Setiabudi, 2013, *Pedoman Mengurus Surat Tanah Beserta Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta.



- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Nandang Alamsah, et.al, 2019, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipid M. hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rokhmin Dahuri, Dkk, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2013, *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soehadi R, 2010, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agrarian*, Susana Offict, Surabaya.
- Sri Susyanti Nur, 2010, *Bank Tanah*, As Publishing, Makassar.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.
- Suharyono M. Hadiwiyono, 2020, *Hukum Pertanahan Di indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Intelegensia Media, Malang.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Surabaya.



Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka.

Iahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

Karya Tulis Ilmiah :

Abusa Mamulati, *“Kepastian Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Menurut Pasal 4 Dan 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”*, Tesis, Universitas Brawijaya, 2018.

Siti Munawirayah, *“Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Wilayah Pesisir Pantai”*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.

Yusra Hidayat Rasyid, *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017.

Jurnal :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Annisa Justisia Tirtakoeseomah, Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Dalam Jurnal Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 18, No. 1, 2019, hal. 4.

Muhammad Ilham Arisaputra, *Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia*, , Volume 15 jurnal Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

Rahmat Datau, *Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Volume 2 nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2019.

Sri Winarsi, *“ Wewenang Pertanahan di Era Otonomi Daerah”*, Jurnal Yuridika, Vol. 23 No.3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September 2008, Hal. 263.

i, *Dasar dan Ruang Lingkup Wewenang Dalam Hak Pengelolaan*, Majalah Yuridika, Vol. 21 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Mei 2006, Hal. 246.



Urip Santoso, “ *Pengaturan Hak Pengelolaan*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 15 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Juni 2008.

Yulia Asyiawati, Lely Syiddatul Akliyah, *Identifikasi Dampak Peubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong*, Volume 14 no 1, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Internet :



<https://djhk.bantenprov.go.id/read/article/244/MENGENAL-EKOSISTEM-PESISIR-DANLAUT.html>,

iduthukum.com/2017/09/asas-dan-tujuan-penataan-ruang.html,

www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-

LAMPIRAN



Lampiran 1.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 5107/UN4.5.1/PT.01.04/2023
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Juli 2023

Yth. : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulawesi Selatan
di
Makassar**

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Ruqaiyah Z Entengo**
Nomor Pokok : **B022192017**
Program : **Magister (S2) Kenotariatan**
Judul Penelitian : **Penataan Ruang Pada Kawasan Pesisir Terhadap Penguasaan Atas Tanah Turun Temurun Masyarakat Di Pulau Puteangin Kabupaten Barru**
Penasihat : **Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.** Pembimbing Utama
Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : **Juli 2023 s.d. Selesai**

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.
Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.


Dekan
Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan
1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
2 Sdr. Ruqaiyah Z Entengo
3 Arsip



Lampiran 2.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 21718/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Bupati Barru
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru
		3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Barru

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 5107/UN4.5/PT.01.04/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RUQAIYAH Z ENTENGO
Nomor Pokok	: B022192017
Program Studi	: <u>Kenotariatan</u>
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" PENATAAN RUANG PADA KAWASAN PESISIR TERHADAP PENGUASAAN ATAS TANAH TURUN-TEMURUN MASYARAKAT DI PULAU PUTEANGIN KABUPATEN BARRU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juli s/d 21 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juli 2023

 H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Lampiran 3.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Hasanuddin No.19 Barru Tlp/Fax. 0427 – 21022 Email: kab-barru@atrbtn.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 827/S.Ket-73.11.UP.02.03/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daud Wijaya Sitorus, S.P, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
Nip : 19720927 199603 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru

Dengan ini menerangkan Mahasiswa :

Nama : RUQAIYAH Z ENTENGO
No. Pokok : B022192017
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar

Telah melakukan penelitian/pengambilan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Barru yang berlangsung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023 dalam rangka penyusunan Tesis dengan Judul "Penataan Ruang Pada Kawasan Pesisir Terhadap Penguasaan Atas Tanah Turun-Temurun Masyarakat Di Pulau Puteangin Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 22 Agustus 2023

Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Barru,
*Ditandatangani Secara
Elektronik*
Daud Wijaya Sitorus, S.P., M.Si
NIP. 19720927 199603 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Peringgal



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melalui Profesional Tegasmu

9.1.007

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RILAU
DESA LASITAE

Alamat Jln. Poros Makassar Pare-Pare Km 85 Barru Kode Pos 90761

SURAT KETERANGAN
Nomor : ~~40-5/70~~ / DESA LASITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTINI BAHARUDDIN
Jabatan : Kepala Desa Lasitae

Menerangkan bahwa :

Nama : RUQAIYAH Z ENTENGO
No. Pokok : B022192017
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.,. 10 Makassar

Bahwa benar Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Lasitae (Dusun Putiangin) mulai Tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir Skripsi dengan judul ***"Penataan Ruang Pada Kawasan Pesisir Terhadap Penguasaan Atas Tanah Turun Temurun Masyarakat Di Pulau Putiangin Kabupaten Barru"*** .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Lasitae, 18 Oktober 2023

Kepala Desa Lasitae



KARTINI BAHARUDDIN



Lampiran 5



Wawancara di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barru



Wawancara di Kantor Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru



Wawancara Dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru



Lampiran 6

